

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital memiliki 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama pada tahun 2026. Hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I 2026	Realisasi Triwulan I	Realisasi Tahunan	Capaian Triwulan I (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Baik						
1.1	Indikator 1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	100%	10%	10%	10%	100%
1.2	Indikator 1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	100%	10%	10%	10%	100%
1.3	Indikator 1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	100%	50%	50%	50%	100%
1.4	Indikator 1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	100%	25%	25%	25%	100%
1.5	Indikator 1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy	Persentase	100%	25%	25%	25%	100%
1.6	Indikator 1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	87%	-	101,93%*	101,93%*	110%*
1.7	Indikator 1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4	-	3,24**	3,24**	110%

*) Nilai capaian merupakan nilai tahun 2025, mempertimbangkan penilaian Zona Integritas Tahun 2026 dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026.

**) Nilai capaian merupakan realisasi Semester II Tahun 2025.

Kinerja Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital pada Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Baik
---	--

Pencapaian Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian tujuh indikator kinerja yaitu:

- 1.1. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
- 1.2. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
- 1.3. Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
- 1.4. Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
- 1.5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy
- 1.6. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
- 1.7. Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1.1. Tingkat
Implementasi
Reformasi Birokrasi
Deputy Bidang
Koordinasi
Perniagaan dan
Ekonomi Digital**

Latar Belakang

Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi Reformasi Birokrasi diukur dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi Reformasi Birokrasi yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup bukti dukung Implementasi semua kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada Peraturan Menpan-RB terkait Peraturan Menteri PANRB tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2025 dan Peraturan Menteri PANRB tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, serta Peraturan turunannya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro yang menangani Reformasi Birokrasi.

Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung RB General dan RB Tematik yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital:

$$\text{Tingkat implementasi RB} = \frac{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 mempertimbangkan dokumen output (bukti dukung) yang dihasilkan setiap indikator yang dalam lingkup koordinasi Sekretariat Deputy yang selanjutnya ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026. Target tersebut ditetapkan sebagai komitmen Unit Kerja untuk mendukung pencapaian implementasi Reformasi Birokrasi pada tingkat Kementerian. Unit kerja

berkomitmen untuk memenuhi seluruh data dukung implementasi Reformasi Birokrasi yang memenuhi standar substansi dan standar ketepatan waktu.

Adapun target Triwulan I 2026 adalah sebesar 100% dengan beberapa dokumen output, berupa: (i) Penyusunan dan penetapan perjanjian, rencana aksi, dan manual IKU; (ii) Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI; (iii) Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran; (iv) Indeks Tata Kelola Pengadaan – Pengisian dan Pencatatan pencatatan SIRUP; (v) Indeks Sistem Merit – E-Kinerja BKN; (vi) Capaian IKU – Laporan Kinerja Triwulanan.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital mencapai 100%, yang dihitung berdasarkan total bukti dukung Reformasi Birokrasi yang dihasilkan sesuai standar sebanyak 10 dokumen, dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Realisasi Tahunan	% Kinerja
IKU 1.1. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	10%	10%	10%	100% (memuaskan)

*) Realisasi Tahunan merupakan kumulatif realisasi pada Triwulan I Tahun 2026

Dokumen bukti dukung Reformasi Birokrasi yang telah dihasilkan sesuai standar sampai dengan triwulan I tahun 2026 antara lain:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan – Perjanjian Kinerja, Renaksi, Manual IKU dan Renja 2027 (1 Dokumen)
2. Tingkat Digitalisasi Arsip (3 Dokumen)
3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (3 Dokumen)
4. Indeks Tata Kelola Pengadaan – SIRUP (1 Dokumen)
5. Indeks Sistem Merit – E-Kinerja BKN (1 Dokumen)
6. Capaian IKU (1 Dokumen)

Rincian lebih lanjut dapat diakses pada tautan berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ZI84dYhueOTsfv3LTb7-lwgog1yAVnKq?usp=sharing>

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Penyusunan dan penetapan perjanjian, rencana aksi dan manual IKU	Terlaksana	Penyusunan dan Penetapan PK, Renaksi dan Manual IKU telah terlaksana melalui

			beberapa kegiatan/dokumentasi sebagai berikut: - ND Sesmenko Perekonomian No. AK.3.1-42/SES.M.EKON/03/2026 tanggal 3 Maret 2026 hal Penandatanganan Perjanjian Kinerja T.A. 2026; - Dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU Tahun 2026 yang sudah dittd Es.I dan Es. II - Dokumentasi foto Bapak/Ibu Es.II saat sedang menandatangani dokumen PK 2026.
2	Tingkat Digitalisasi Arsip	Terlaksana	Tingkat Digitalisasi Arsip pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan/dokumentasi sebagai berikut: - ND Sesdep ke Kepala Biro Umum SDM No. TU.01.01/32/D.III.M.EKON. 1/01/2026 tanggal 15 Januari 2026 hal Penyampaian Daftar Pengelola Arsip dan Admin SRIKANDI Tahun 2026; - Surat Sesmenko Perekonomian No. TU.04/1/SES.M.EKON/01/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kemenko Perekonomian; - ND Kepala Biro Umum SDM tanggal 26 Januari 2026 hal Laporan Keaktifan User Aplikasi SRIKANDI Kemenko Perekonomian Bulan Oktober - Desember Tahun 2025; - ND Sesdep kepada Asdep No.TU.04/95/D.III.M.EKON. 1/02/2026 tanggal 13 Februari 2026 hal Hasil Evaluasi Keaktifan User Aplikasi SRIKANDI.
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Terlaksana	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran telah terlaksana berdasarkan kegiatan/dokumentasi sebagai berikut: - Dialog Kinerja Internal

			Deputi III pada tanggal 23 Januari 2026 sesuai Surat Undangan No. KU.01.02/43/D.III.M.EKO N.1/01/2026 tanggal 22 Januari 2026. - ND Sesdep ke Asdep No. KU.01.02/65/D.III.M.EKO N.1/01/2026 tanggal 28 Januari 2026 hal Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 di Lingkup Deputi III. - Surat Undangan Kepala Biro Umum dan SDM No. KU.01/9/SET.M.EKON.4/01/2026 tanggal 28 Januari 2026 hal Undangan Rapat Koordinasi Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2026. - Surat Kepala Biro Umum dan SDM No. B/KU.01/116/SET.M.EKO N.4/02/2026 tanggal 6 Februari 2026 hal Laporan Realisasi Anggaran per 31 anuari 2026. - Surat Kepala Biro Umum dan SDM No. B/KU.01/198/SET.M.EKO N.4/03/2026 tanggal 6 Maret 2026 hal Laporan Realisasi Anggaran per 28 Februari 2026. - Surat Kepala Biro Umum dan SDM No. B/KU.01/269/SET.M.EKO N.4/04/2026 tanggal 2 April 2026 hal Laporan Realisasi Anggaran per 31 Maret 2026.
4	Indeks Tata Kelola Pengadaan – SIRUP	Terlaksana	Indeks Tata Kelolaa Pengadaan - SIRUP periode Triwulan I Tahun 2026 terlaksana melalui kegiatan Coaching Clinic Pencatatan SIRUP di Lingkungan Kemenko Perekonomian pada tanggal 2-4 Maret 2026 sesuai Surat Nomor PB.01.01/1/SET.M.EKON.4. 2/02/2026 tanggal 25 Februari 2026.
5	Indeks Sistem Merit – E-Kinerja BKN	Terlaksana	Indeks Sistem Merit – E-Kinerja BKN terlaksana berdasarkan tindak lanjut ND Kepala Biro Umum dan SDM

			No. KP.08.01/28/SET.M.EKON. 4/01/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Penilaian Kinerja ASN Tahun 2025 dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2026. Deputi III telah mengumpulkan bukti dukung berupa SKP yang dicreate melalui aplikasi E-kinerja pada tautan berikut: https://tinyurl.com/SKPD3Tahun2026-Signed. Selain itu, menindaklanjuti ND Biro Umum dan SDM No. KP/116/SET.M.EKON.4/02/ 2026 tanggal 5 Februari 2026 hal Evaluasi Sementara Penilaian Kinerja ASN Tahun 2025, Deputi III telah memberikan arahan melalui disposisi No. 267 tanggal 9 Februari 2026 kepada seluruh unit kerja Es.II di lingkungan Deputi III.
6	Penyusunan laporan kinerja triwulanan	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I telah terlaksana melalui dokumentasi/kegiatan sebagai berikut: - Evaluasi catatan terkait Narasi Kinerja TW IV 2025 berdasarkan ND Sesdep ke MKKS No. AK.03.01/66/D.III.M.EKON.1/01/2026 tanggal 14 Januari 2026 hal Penyampaian Narasi Kinerja TW IV Tahun 2025. - Laporan dari Kelompok Kerja PEPPKTK kepada Sekretaris Deputi tentang Catatan Standar Penyusunan Narasi Kinerja Lingkup Deputi III sesuai ND No. AK.04.01/3/D.III.M.EKON.1.3/03/2026 tanggal 9 Maret 2026.

Selain itu, upaya lainnya untuk menunjang IKU ini Sekretariat Deputi III telah berpartisipasi dalam kegiatan:

1. Menindaklanjuti ND Biro Hukum dan Organisasi No. RB.02/74/SET.M.EKON.2/03/2026 tanggal 30 Maret 2026 hal Permohonan Pengusulan Anggota Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Tahun 2026, Deputi

- III telah mengirimkan ND Balasan No. RB.02/154/D.III.M.EKON.1/04/2026 tanggal 1 April 2026 hal Konfirmasi Pengusulan Anggota Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Deputy III Tahun 2026.
2. Menindaklanjuti ND Biro Hukum dan Organisasi No. RB.02/12/SET.M.EKON.2/01/2026 tanggal 15 Januari 2026 hal Penyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2025, Deputy III telah menyampaikan hasil Monev tersebut kepada Agen Perubahan Deputy III melalui ND No. RB.03/35/D.III.M.EKON.1/01/2026 tanggal 19 Januari 2026.
 3. Berdasarkan poin 1 s/d 2 tersebut di atas, Bapak Deputy memberikan arahan melalui Disposisi Nomor 129 tanggal 22 Januari 2026 dengan keterangan disposisi agar ditindaklanjuti catatan hasil Monev tersebut.
 4. Beberapa kegiatan tambahan dalam menunjang IKU 1.1 ini telah kami sampaikan melalui tautan berikut:
<https://drive.google.com/drive/folders/1ZI84dYhueOTsfv3LTb7-lwgog1yAVnKq?usp=sharing>

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan rapat koordinasi melalui *video conference*, rapat koordinasi secara hybrid menggunakan fasilitas kantor. Jumlah efisiensi dari pengadaan rapat koordinasi melalui video conference tersebut diperkirakan mencapai Rp61.650.000 melalui penghematan biaya paket meeting di hotel. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain mendukung implementasi RB di Deputy III pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan konsistensi antar unit kerja dalam penyusunan dokumen kinerja, kelengkapan bukti dukung, serta implementasi aplikasi pendukung Reformasi Birokrasi.
2. Proses konsolidasi data dan koordinasi lintas unit kerja masih memerlukan waktu karena penyampaian data dan dokumen belum seluruhnya dilakukan secara tepat waktu dan seragam.

Berdasarkan kendala-kendala dan capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat pembinaan dan pendampingan melalui coaching clinic, sosialisasi, monitoring dan evaluasi berkala, serta penyusunan standar penyusunan dokumen kinerja dan bukti dukung, salah satunya melalui penerbitan ND No. AK.04.01/3/D.III.M.EKON.1.3/03/2026 tanggal 9 Maret 2026 hal Catatan Standar Penyusunan Narasi Kinerja Lingkup Deputy III.
2. Mengoptimalkan koordinasi dan pengelolaan data melalui penetapan timeline pelaporan, penyampaian reminder secara berkala, serta pemanfaatan media digital dan penyimpanan dokumen secara terpusat agar proses konsolidasi lebih efektif dan efisien.

1.2. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Latar Belakang

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian Sasaran Kegiatan ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi tata kelola diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan tata kelola di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi tata kelola yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan II, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup Implementasi tata kelola diukur dari data dukung dokumen tata kelola meliputi dokumen keuangan, sistem pengendalian internal, data dan informasi, organisasi, tata laksana dan SDM, BMN, kearsipan, humas, protokol, persidangan, naskah pimpinan, hukum, dan SOP. Adapun waktu dan format akan diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kepala Biro yang akan mengampu dokumen dimaksud.

Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital:

$$\text{Tingkat Implementasi Tata Kelola} = \frac{\text{Total Bukti Dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung Tata Kelola yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 90, Sekretaris Deputy melaksanakan tugas koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata Kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026 adalah sebesar 100%. Target tersebut dihitung berdasarkan total bukti dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar dibagi dengan total bukti dukung yang seharusnya dihasilkan pada rentang waktu tertentu.

Adapun target Triwulan I 2026 adalah sebesar 10% dengan beberapa output, berupa: (i) Dokumen keuangan; (ii) Tata Laksana dan Sumber Daya Manusia; (iii) Barang Milik Negara; dan (iv) Naskah Pimpinan.

Realisasi Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Triwulan I 2026 sebesar 10% dan tahunan juga berhasil tercapai sebesar 10% yang dihitung berdasarkan target total bukti dukung Implementasi Tata Kelola yang dihasilkan pada tahun 2026 sesuai standar sebanyak 5 dokumen, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I 2026	Realisasi TW I	Realisasi Tahunan*	% Kinerja
IKU 1.2.	Persent	10%	10%	10%	100%

<i>Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital</i>	ase				(Memuaskan)
---	-----	--	--	--	-------------

*) Realisasi Tahunan merupakan kumulatif realisasi pada Triwulan I Tahun 2026

Dokumen bukti dukung Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah dihasilkan sesuai standar pada triwulan I tahun 2026 antara lain:

1. Keuangan (2 Dokumen)
2. Tata Laksana dan SDM (1 Dokumen)
3. Barang Milik Negara (1 Dokumen)
4. Kearsipan (12 Rekap Dokumen)
5. Naskah Pimpinan (1 Dokumen)

Rincian lebih lanjut dapat diakses pada tautan berikut:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xswFgqlmHRn5KRKd-Qj83m21fiaEnr53/edit?usp=sharing&ouid=113263907645255775426&rtpof=true&sd=true>.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1.2. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Penyusunan dokumen keuangan	Terlaksana	Penyusunan dokumen keuangan pada triwulan I telah terlaksana melalui hal berikut: - Dialog Kinerja Internal Deputy III bersama Biro Umum SDM hal sosialisasi pelaksanaan anggaran sesuai Surat Undangan No. KU.01.02/43/D.III.M.EKON.1/01/2026 tanggal 22 Januari 2026. - Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 di Lingkungan Deputy III melalui ND No. KU.01.02/65/D.III.M.EKON.1/01/2026 tanggal 28 Januari 2026. - Menyampaikan ND Revisi POK No. PR.04.01/7/D.III.M.EKON.1/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 hal Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan Bulan Januari 2026. - Menyampaikan ND Revisi POK

			No. PR.04.01/118/D.III.M.EKON.1/0 2/2026 tanggal 27 Februari 2026 hal Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan Bulan Februari 2026. - Menyampaikan ND Sesdep hal Revisi POK No. PR.04.01/213/D.III.M.EKON.1/0 4/2026 tanggal 28 April 2026 hal Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan Bulan Maret 2026.
2	Tata Laksana dan Sumber Daya Manusia	Terlaksana	Renaksi Tata Laksana dan Sumber Daya Manusia pada triwulan I telah terlaksana melalui beberapa dokumentasi kegiatan sebagai berikut: - ND Sesdep No. KP.07.01/37/D.III.M.EKON.1/01 /2026 tanggal 20 Januari 2026 hal Permohonan Usulan Peserta Ujikom Kenikan Jenjang JFAK a/n Ade Novita Hakim. - ND Balasan Sesdep ke Biro Umum dan SDM No. KP.07.06/114/D.III.M.EKON.1/0 2/2026 tanggal 24 Februari 2026 hal Usulan Peserta Latsarmil Komcad unit Deputi III atas dasar ND Biro Umum dan SDM No. KP.07.06/143/SET.M.EKON.4/0 2/2026 tanggal 18 Februari 2026 hal Permohonan Usulan ASN untuk Mengikuti Latsarmil Komcad. - ND Sesdep No. KP.07.06/85/D.III.M.EKON.1/02 /2026 tanggal 6 Februari 2026 hal Penyampaian Usulan Pelatihan Pegawai Deputi III Tahun 2026. - ND Sesdep ke Biro Hukum Organisasi No. KP.01.01/151/D.III.M.EKON.1/0 3/2026 tanggal 30 Maret 2026 hal Daftar Usulan Kebutuhan Pengadaan ASN di Lingkungan Deputi III TA 2026.
3	Barang Milik Negara	Terlaksana	Renaksi Barang Milik Negara telah terlaksana melalui ND Biro Umum dan SDM No. BM.02.07/383.A/SET.M.EKON.4/ 05/2026 tanggal 29 Mei 2026 hal Permohonan Nama Pendamping

			Inventarisasi BMN, kemudian Deputi III telah memberikan ND Balasan kepada Biro Umum dan SDM No. BM.02.07/265/D.III.M.EKON.1/06/2026 tanggal 3 Juni 2026 hal Nama Pendamping Kegiatan Inventarisasi BMN.
4	Naskah Pimpinan	Terlaksana	Renaksi naskah pimpinan periode triwulan I ini terlaksana melalui penerbitan naskah pimpinan pada Apel Pagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada jadwal petugas apel Deputi III pada tanggal 23 Februari 2026 sesuai Surat Undangan No. TU.05/31/SET.M.EKON.4/02/2026 tanggal 19 Februari 2026.

Selain itu, upaya lainnya untuk menunjang IKU ini Sekretariat Deputi III telah berpartisipasi dalam kegiatan:

1. Melakukan evaluasi terhadap ND Biro Umum dan SDM No. KP.08.01/28/SET.M.EKON.4/01/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Penilaian Kinerja ASN Tahun 2025 dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2026, melalui disposisi Bapak Deputi III No. 112 tanggal 19 Januari 2026 kepada seluruh unit kerja Es. II.
2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Umum dan SDM berdasarkan Surat Undangan No. KU.01/9/SET.M.EKON.4/01/2026 tanggal 28 Januari 2026.
3. Berpartisipasi dalam Surat Edaran Sesmenko Perekonomian No. OT.04/2/SES.M.EKON/02/2025 tanggal 28 Februari 2026 hal Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriyah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, seperti menggunakan dokumen digital dan memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dalam melakukan persuratan, rapat koordinasi melalui *video conference*, rapat koordinasi secara hybrid menggunakan fasilitas kantor. Jumlah efisiensi dari pengadaan rapat koordinasi melalui video conference tersebut diperkirakan mencapai Rp41.400.000 melalui penghematan biaya paket meeting di hotel. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain mendukung implementasi Tata Kelola di Deputi III pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, walaupun semua renaksi sudah dapat dilaksanakan, namun masih terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, diantaranya:

1. Jumlah dan kompetensi SDM yang mengelola isu tata kelola dalam unit kerja masih terbatas, sehingga pelaksanaan pembinaan dan evaluasi belum maksimal.
2. Terdapat beberapa pegawai yang belum memahami persyaratan kenaikan pangkat dan/atau jenjang, termasuk dalam memantau angka kredit secara

mandiri.

3. Adanya penugasan tambahan menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran (revisi POK).

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai, diantaranya:

1. Melaksanakan *knowledge sharing* atau sosialisasi terkait implementasi tata kelola di Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.
2. Mengundang Biro Umum dan SDM untuk melaksanakan koordinasi terkait kenaikan pangkat/jenjang sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Menyiapkan bahan perencanaan anggaran yang lebih baik dan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) untukantisipasi penugasan tambahan.

1.3.

Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Latar Belakang

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, mengamanatkan untuk melakukan evaluasi kinerja anggaran. Hal ini untuk memastikan perencanaan anggaran sesuai dengan capaian *output* yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran.

Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan ukuran yang menggambarkan efektivitas perencanaan unit kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan perencanaan di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan Tingkat Efektivitas Perencanaan yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan II, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dari data dukung dokumen perencanaan meliputi dokumen:

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Deputy, paling lambat harus disahkan 5 (lima) bulan setelah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) disahkan. Adapun standar penyusunan mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.
2. Rencana Kerja (RENJA), paling lambat harus selesai bulan juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
3. Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi, paling lambat harus ditetapkan pada akhir januari tahun berjalan. Adapun standar penyusunan dokumen ini mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. TOR RAB, paling lambat harus selesai bulan juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), paling lambat akhir february. Adapun Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ruang lingkup Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dari data dukung dokumen

perencanaan meliputi dokumen RENSTRA Deputy, RENJA, PK, Manual IKU, Rencana Aksi, TOR RAB, dan SKP.

Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung Perencanaan yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital:

$$\text{Tingkat Efektivitas Perencanaan} = \frac{\text{Total Bukti Dukung Perencanaan yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung Perencanaan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026 adalah sebesar 100%. Target tersebut dihitung berdasarkan total bukti dukung Perencanaan yang dihasilkan sesuai standar dibagi dengan total bukti dukung yang seharusnya dihasilkan pada rentang waktu tertentu. Adapun target Triwulan I 2026 adalah sebesar 50% dengan output berupa: (i) PK; (ii) Manual IKU; (iii) Rencana Aksi; dan (iv) SKP.

Pada Triwulan I 2026, realisasi Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sebesar 50% (realisasi 100% dari target 50%) dan realisasi tahunan juga sebesar 50% yang dihitung berdasarkan target total bukti dukung 22 dokumen, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Realisasi Tahunan*	% Kinerja
IKU 1.3. Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	50%	50%	50%	100% (Memuaskan)

*) Realisasi Tahunan merupakan kumulatif realisasi pada Triwulan I Tahun 2026

Dokumen bukti dukung Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah dihasilkan sesuai standar pada Triwulan I tahun 2026 antara lain:

1. Perjanjian Kinerja (7 Dokumen)
2. Manual IKU (7 Dokumen)
3. Rencana Aksi (7 Dokumen)
4. Sasaran Kinerja Pegawai (1 Paket Dokumen)

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 1.3. Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Terlaksana	Penyusunan Perjanjian Kinerja pada Triwulan I telah terlaksana berdasarkan ND Sesmenko Perekonomian No. AK.3.1-42/SES.M.EKON/03/2026 tanggal 3 Maret 2026 hal Penandatanganan Perjanjian Kinerja T.A. 2026, yang telah Deputi III tindak lanjuti melalui Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja Es. I dan Es. II di lingkungan Deputi III.
2	Penyusunan Manual IKU	Terlaksana	Penyusunan Manual IKU pada Triwulan I telah terlaksana melalui beberapa dokumentasi kegiatan: - Surat Undangan Sesdep No. AK.01.02/42/D.III.M.EKON.1/01/2026 tanggal 20 Januari 2026 hal Coaching Clinic Penyusunan PK, Manual IKU, dan Renaksi TA 2026. - Dokumen Manual IKU yang telah disahkan oleh Es.I dan Eselon II di lingkungan Deputi III. - Surat Undangan Sesdep No. AK.01.01/167/D.III.M.EKON.1/04/2026 tanggal 13 April 2026 hal Coaching Clinic Finalisasi Manual IKU dan Rencana Aksi Tahun 2026. - ND Sesdep kepada MKKS No. AK.01.01/185/D.III.M.EKON.1/04/2026 tanggal 16 April 2026 hal Penyampaian Manual IKU dan Rencana Aksi Deputi III TA 2026.
3	Penyusunan Rencana Aksi	Terlaksana	Penyusunan Rencana Aksi pada Triwulan I telah terlaksana melalui beberapa dokumentasi kegiatan: - Surat Undangan Sesdep No. AK.01.02/42/D.III.M.EKON.1/01/2026 tanggal 20 Januari 2026 hal Coaching Clinic Penyusunan PK, Manual IKU, dan Renaksi TA 2026. - Dokumen Rencana Aksi yang telah disahkan oleh Es.I dan Eselon II di lingkungan Deputi III.
4	Sasaran Kinerja Pegawai	Terlaksana	Renaksi Sasaran Kinerja Pegawai Triwulan I telah terlaksana melalui dokumentasi kegiatan:

			- ND Kepala Biro Umum dan SDM No. KP.08.01/28/SET.M.EKON.4/01/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Penilaian Kinerja ASN Tahun 2025 dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2026. - Deputi III telah mengumpulkan bukti dukung berupa SKP yang dicreate melalui aplikasi E-kinerja pada tautan berikut: https://tinyurl.com/SKPD3Tahun2026-Signed. - Selain itu, menindaklanjuti ND Biro Umum dan SDM No. KP/116/SET.M.EKON.4/02/2026 tanggal 5 Februari 2026 hal Evaluasi Sementara Penilaian Kinerja ASN Tahun 2025, Deputi III telah memberikan arahan melalui disposisi No. 267 tanggal 9 Februari 2026 kepada seluruh unit kerja Es.II di lingkungan Deputi III.
--	--	--	---

Selain itu, upaya lainnya untuk menunjang IKU ini Sekretariat Deputi III telah berpartisipasi dalam kegiatan:

1. Menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Deputi No. 2 Tahun 2026 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Dukungan Penguatan Perencanaan Program dan Pelaporan di Lingkungan Deputi III Tahun 2026.
2. Turut berpartisipasi dalam agenda rapat Biro MKKS No. AK.01.01/8/SET.M.EKON.1/01/2026 tanggal 27 Januari 2026 dalam rangka Evaluasi Perencanaan Kinerja dan Finalisasi Konsep Perjanjian Kinerja Tahun 2026, serta Sharing Session Perencanaan Kinerja Tahun 2026 bersama Kemenko PMK.
3. Turut berpartisipasi dalam agenda rapat Biro MKKS No. AK.01.01/31/SET.M.EKON.1/03/2026 tanggal 12 Maret 2026 dalam rangka Penyempurnaan Konsep Manual IKU dan Rencana Aksi Tahun 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, seperti menggunakan dokumen digital dan memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dalam melakukan persuratan, rapat koordinasi melalui *video conference*, rapat koordinasi secara hybrid menggunakan fasilitas kantor. Jumlah efisiensi dari pengadaan rapat koordinasi melalui video conference tersebut diperkirakan mencapai Rp41.400.000 melalui penghematan biaya paket meeting di hotel. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain mendukung implementasi perencanaan di Deputi III pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Meskipun target Tingkat Efektivitas Perencanaan Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai sesuai target, masih terdapat beberapa tantangan dalam proses

implementasi perencanaan kinerja, diantaranya:

1. Penyusunan dokumen perencanaan memerlukan koordinasi yang intensif antara Sekretariat Deputy dengan seluruh unit kerja Eselon II untuk memastikan keselarasan sasaran strategis, indikator kinerja, target, serta keterkaitan antara Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rencana Aksi, dan Sasaran Kinerja Pegawai.
2. Penyempurnaan konsep Manual IKU dan Rencana Aksi sebagai tindak lanjut hasil pembahasan bersama Biro MKKS menyebabkan perlunya penyesuaian dokumen secara bertahap agar tetap selaras dengan kebijakan dan pedoman terbaru.
3. Konsistensi kualitas dokumen, kelengkapan bukti dukung, serta ketepatan waktu penyampaian dari masing-masing unit kerja masih memerlukan penguatan agar proses pengendalian dan monitoring perencanaan dapat berjalan lebih efektif koordinasi antar unit kerja dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pada triwulan berikutnya, upaya Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yaitu:

1. Memperkuat mekanisme koordinasi dan pendampingan kepada seluruh unit kerja dalam penyusunan, revidi, dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja sehingga seluruh dokumen tetap selaras dengan kebijakan organisasi dan pedoman yang berlaku.
2. Optimalisasi peran Kelompok Kerja Dukungan Penguatan Perencanaan Program dan Pelaporan akan terus dilakukan sebagai forum koordinasi, konsultasi, serta pengendalian kualitas dokumen perencanaan.
3. Monitoring berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi juga akan ditingkatkan melalui evaluasi capaian secara periodik, pemanfaatan aplikasi digital seperti SRIKANDI dalam pengelolaan dokumen, serta penguatan pemahaman kepada PIC unit kerja melalui forum koordinasi, sharing session, dan asistensi teknis agar kualitas perencanaan semakin terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi.

1.4.

Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Latar Belakang

Ketaatan pelaporan adalah kemampuan dan komitmen seluruh unit eselon I (Kedeputian) untuk secara konsisten memenuhi ketentuan pelaporan resmi, baik yang bersifat internal maupun eksternal sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman tata kelola yang berlaku. Ketaatan pelaporan ini merupakan bagian dari sistem pengendalian dan akuntabilitas kinerja kementerian. Tujuan dari ketaatan pelaporan ini untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja dapat memenuhi kewajiban penyampaian laporan nya secara tepat waktu, lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketaatan ini dinilai berdasarkan 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan II, III, IV dan V) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu. Adapun standar laporan yang diacu adalah Peraturan Menteri RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Menteri 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun ruang lingkup laporan yang termasuk pada indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Triwulan I s.d IV (10 hari kerja setelah triwulan berakhir);
2. E-Monev (2 hari kerja pada tiap bulan);
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (akhir februari pada tahun berjalan); dan
4. Laporan SKP Triwulan I s.d IV (minggu terakhir pada bulan ke 4,7,10 dan 12).

Adapun formula perhitungan indikator Tingkat Ketaatan pelaporan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total laporan yang memenuhi standar ketaatan}}{\text{Total laporan yang disusun}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Inisiatif Strategis Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yaitu terwujudnya kepatuhan pelaporan di unit Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Komponen-komponen utama ketaatan pelaporan yaitu: (i) Monitoring pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan; (ii) Menyiapkan Bahan Publikasi Media; Persiapan Pelaporan E-Monev; (iii) Pelaporan Sasaran Kinerja Individu Triwulan I; dan Penyusunan Laporan Narasi Kinerja Triwulan I.

Target kinerja Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026 adalah sebesar 100%. Target tersebut dihitung berdasarkan total laporan yang memenuhi standar ketaatan dibagi dengan total laporan yang seharusnya disusun pada rentang waktu tertentu.

Realisasi tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital pada Triwulan sebesar 25%, mencapai 100% dari target Triwulan I Tahun 2026 yaitu 25%. Target total bukti dukung Tingkat Ketaatan Pelaporan yang dihasilkan pada tahun 2026 sesuai standar sebanyak 4 dokumen, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I 2026	Realisasi TW I Tahun 2026	Realisasi Tahunan*	% Kinerja
IKU 1.4. Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	25%	25%	25%	100% (Memuaskan)

*) Realisasi Tahunan merupakan kumulatif realisasi pada Triwulan I Tahun 2026

Dokumen bukti dukung Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah dihasilkan sesuai standar pada triwulan I tahun 2026 antara lain:

1. Laporan Kinerja Triwulan I (1 Dokumen)
2. E-Monev (1 Dokumen)
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (1 Dokumen)
4. Laporan Penilaian SKP Triwulan I (4 Dokumen)

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.4. Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Monitoring pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan	Terlaksana	Penyampaian LHKPN Tahun 2025 sudah dilaksanakan oleh seluruh pegawai Deputy 3 yang wajib lapor LHKPN. Per tanggal 17 April 2026, seluruh pimpinan yang wajib LHKPN telah menyampaikan laporan LHKPNnya (8 wajib LHKPN). Hal ini sudah disampaikan kepada Biro HO pada tanggal 18 April 2026. Kemudian Penyampaian Non-LHKPN atau SPT Tahunan juga sudah dilaksanakan oleh hampir seluruh pegawai Deputy 3. Tercatat pada tanggal 30 April 2026, sebanyak 91 pegawai wajib SPT telah menyampaikan palaporan. Bukti dukung melalui tautan https://tinyurl.com/BuktiDukungPajakD3
2	Menyiapkan bahan publikasi media Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Terlaksana	Bahan publikasi pada Triwulan I ini telah terlaksana melalui release berita melalui Website Resmi Kemenko Perekonomian, diantaranya: 1. Dialog Kinerja 2026: Evaluasi Capaian 2025 dan Pembahasan Arah Program Strategis Deputy 3 Tahun 2026 (Rilis 2 Januari 2026). 2. Gig Economy DIY, "Pemerintah Fasilitas Generasi Muda sebagai Motor Penggerak Transformasi Digital melalui Program Pelatihan Gig Economy" (Rilis 16 Januari 2026). 3. Gig Economy Kota Bandung, "Gig Economy Jadi Ruang Berkarya Generasi Muda, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital yang Berkelanjutan" (Rilis 30 Januari 2026). 4. Strategi Mengubah Volatilitas Global Indonesia Economic Summit/IES (Rilis 4 Februari 2026). 5. Sinergi Digitalisasi Pusat dan Daerah, Kemenko Perekonomian Paparkan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital

			(Rilis 12 Maret 2026). 6. Perkuat Sinergi Industri, Indonesia-RRT Sepakati Percepatan Investasi Lewat Skema “Two Countries, Twin Parks” (Rilis 6 Februari 2026). 7. Pemerintah Dorong Konsumsi Domestik Sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penyelenggaraan BINA Lebaran 2026 (Rilis 7 Maret 2026). 8. Pemerintah Siapkan SDM Unggul untuk Masuki Industri Semikonduktor Global (Rilis 6 Maret 2026). 9. Pemerintah Dorong Kolaborasi Asia-Oceania untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital Berkelanjutan (13 Maret 2026).
3	Persiapan pelaporan E-Monev	Terlaksana	Persiapan Pengisian Aplikasi E-Monev Triwulan IV T.A 2025 telah dilaksanakan melalui tindak lanjut ND Biro MKKS No. AK.03.01/120/SET.M.EKON.1/04/2026 tanggal 16 April 2026 hal Informasi Pelaporan Capaian Triwulan I TA 2025 pada Aplikasi E-Monev.
4	Pelaporan capaian kinerja individu (SKP) triwulan I	Terlaksana	Renaksi Sasaran Kinerja Pegawai Triwulan I telah terlaksana melalui dokumentasi kegiatan: - ND Kepala Biro Umum dan SDM No. KP.08.01/28/SET.M.EKON.4/01/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Penilaian Kinerja ASN Tahun 2025 dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2026. - Deputi III telah mengumpulkan bukti dukung berupa SKP yang dicreate melalui aplikasi E-kinerja pada tautan berikut: https://tinyurl.com/SKPD3Tahun2026-Signed. Selain itu, menindaklanjuti ND Biro Umum dan SDM No. KP/116/SET.M.EKON.4/02/2026 tanggal 5 Februari 2026 hal Evaluasi Sementara Penilaian Kinerja ASN Tahun 2025, Deputi III telah memberikan arahan melalui disposisi No. 267 tanggal 9 Februari 2026 kepada seluruh unit kerja Es.II di lingkungan Deputi III.
5	Penyusunan laporan capaian kinerja triwulan I	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I telah terlaksana melalui dokumentasi/kegiatan sebagai berikut: - Evaluasi catatan terkait Narasi Kinerja

			TW IV 2025 berdasarkan ND Sesdep ke MKKS No. AK.03.01/66/D.III.M.EKON.1/01/2026 tanggal 14 Januari 2026 hal Penyampaian Narasi Kinerja TW IV Tahun 2025. Laporan dari Kelompok Kerja PEPPKTK kepada Sekretaris Deputi tentang Catatan Standar Penyusunan Narasi Kinerja Lingkup Deputi III sesuai ND No. AK.04.01/3/D.III.M.EKON.1.3/03/2026 tanggal 9 Maret 2026.
--	--	--	--

Selain itu, upaya lainnya untuk menunjang IKU ini Sekretariat Deputi III telah berpartisipasi dalam kegiatan:

1. Melaksanakan Dialog Kinerja sesuai Surat Undangan No. AK.03.01/84/D.III.M.EKON.1/02/2026 pada tanggal 6 Februari 2026 hal Penyusunan LAKIP Tahun 2026, sekaligus perumusan evaluasi Standar Penyusunan Narasi Kinerja Tahun 2026.
2. Melaksanakan Rapat Koordinasi sesuai Surat Undangan No. AK.03.01/87/D.III.M.EKON.1/02/2026 pada tanggal 11 Februari 2026 hal Finalisasi LAKIP Tahun 2026, sekaligus penyampaian evaluasi Standar Penyusunan Narasi Kinerja Tahun 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, seperti menggunakan dokumen digital dan memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dalam melakukan persuratan, rapat koordinasi melalui *video conference*, rapat koordinasi secara hybrid menggunakan fasilitas kantor. Jumlah efisiensi dari pengadaan rapat koordinasi melalui video conference tersebut diperkirakan mencapai Rp61.650.000 melalui penghematan biaya paket meeting di hotel. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain mendukung implementasi pelaporan di Deputi III pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, walaupun semua renaksi sudah dapat dilaksanakan, namun terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Pelaporan memerlukan kontribusi dari beberapa bidang, sering kali terkendala karena belum ada arahan Pimpinan kepada PIC dari masing-masing unit kerja, keterlambatan input data atau perbedaan persepsi antar bagian;
2. Sering terjadi perubahan format atau penambahan kebutuhan laporan unit kerja pengampu, sementara sistem pengumpulan data dan pembagian tugas belum fleksibel untuk merespon cepat.
3. Masih mengumpulkan data dan informasi secara manual dan masih sesuai dengan permintaan atasan, sehingga membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data dan informasi.

Berdasarkan kendala tersebut, maka dilakukan beberapa upaya/rekomendasi sebagai berikut:

1. Menyampaikan Nota Dinas kepada unit kerja terkait untuk mengingatkan tugas dan fungsi PIC Pokja Pelaporan.
2. Menyusun laporan dengan format baku yang telah ditentukan oleh Sekretariat Kemenko Perekonomian.
3. Membuat sistem pengarsipan data dan informasi sederhana melalui media penyimpanan secara daring untuk mempercepat proses pengumpulan data dan informasi.

1.5.
Persentase
Penyelesaian
Isu Strategis
yang Diberikan
oleh Deputi

Latar Belakang

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengamanatkan Sekretaris Deputi untuk dapat menjalankan penugasan lain yang diberikan oleh Deputi. Penugasan ini dapat bersifat tata kelola dan substantif yang bersifat lintas keasdepan. Khusus untuk penugasan yang bersifat substantif, Sekretaris Deputi bertanggung jawab untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terhadap isu-isu strategis yang menjadi fokus kedeputian.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital pada tahun ini mengawal isu – isu strategis kedeputian yang meliputi :

1. Koordinasi kebijakan peningkatan belanja dalam negeri, dikerjakan bersama Asdep Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga;
2. Koordinasi kebijakan terhadap hambatan ekspor/impor, dikerjakan bersama Asdep Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor;
3. Koordinasi penguatan kolaborasi pengelola jasa logistik, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Logistik;
4. Koordinasi penyusunan dashboard logistik nasional, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Logistik;
5. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan data analitik, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Ekonomi Digital;
6. Koordinasi kebijakan penyusunan paket regulasi, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Logistik dan Asdep Peningkatan Inklusi Keuangan.

Adapun kriteria isu-isu strategis selesai apabila apabila : (1) Isu Strategis telah ditindaklanjuti oleh Pihak terkait; (2) Hasil penyelesaian telah dikonfirmasi oleh Kedeputian; dan (3) Dokumen penyelesaian dari isu – isu strategis tersedia serta terverifikasi.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian isu-isu strategis adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Isu – Isu Strategis yang Diselesaikan}}{\text{Total Isu Strategis yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputi Tahun 2026 adalah sebesar 100%. Target tersebut dihitung berdasarkan total isu-isu strategis yang diselesaikan dibagi dengan total isu strategis yang ditetapkan pada rentang waktu tertentu.

Adapun target Triwulan I 2026 adalah sebesar 25% dengan realisasi persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputi 25% atau sebesar 100% dari target Triwulan I Tahun 2026. Ringkasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	Realisasi Tahunan*	% Kinerja
IKU 1.5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputi	Persentase	25%	25%	25%	100% (Memuaskan)

**) Realisasi Tahunan merupakan kumulatif realisasi pada Triwulan I Tahun 2026*

Isu-isu strategis yang diberikan oleh Deputi pada triwulan I Tahun 2026 diantaranya terkait

dengan:

1. Koordinasi kebijakan peningkatan belanja dalam negeri, dikerjakan bersama Asdep Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga (PDNPKTN);
2. Koordinasi kebijakan terhadap hambatan ekspor/impor, dikerjakan bersama Asdep Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor;
3. Koordinasi penguatan kolaborasi pengelola jasa logistik, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Logistik;
4. Koordinasi penyusunan dashboard logistik nasional, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Logistik;
5. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan data analitik, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Ekonomi Digital;
6. Koordinasi kebijakan penyusunan paket regulasi, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Logistik dan Asdep Peningkatan Inklusi Keuangan.

Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Deputy membagi penugasan pegawai Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) pada masing-masing unit kerja eselon 2 Keasdepan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sesuai Surat Perintah Penugasan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Nomor PH.02.04/01/D.III.M.EKON.1/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 yang telah diubah menjadi Surat Perintah Penugasan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Nomor PH.02.04/441/D.III.M.EKON.1/10/2025 tanggal 6 Oktober 2025 sehingga semua isu strategis dapat terpantau dan membantu mempermudah koordinasi internal.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Persiapan Koordinasi isu strategis di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Terlaksana	Tindak lanjut monitoring dan evaluasi isu strategis bidang PDNPKTN dilakukan dengan: 1. Turut berpartisipasi dalam agenda Rapat Koordinasi Evaluasi Program Belanja Nasional 2025 dan Pelaksanaan Program Belanja Nasional Tahun 2026 sesuai Laporan ND No. PED.01.01/2/D.III.M.EKON.1.1/01/2026 tanggal 29 Januari 2026. 2. Penyusunan Bahan Narasumber Diskusi Panel Rapat Kerja Nasional DPP HIPINDO pada tanggal 5 Maret 2026 sesuai Surat Disposisi No. 339 tanggal 23 Februari 2026.
			Tindak lanjut monitoring dan evaluasi isu strategis bidang Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor dilakukan dengan: 1. Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (DHE SDA) sesuai Disposisi No. 2310

			tanggal 5 Januari 2026. 2. Joint Chambers Input on the Planned Revision of the Natural Resource Export Proceeds (DHE SDA) Policy sesuai Disposisi No. 2309 tanggal 5 Januari 2026. 3. Isu Kebijakan Tarif Resiprokal dan Deforestasi untuk Lauan (Meranti) Plywood Indonesia sesuai Disposisi No. 24 tanggal 7 Januari 2026. 4. Penyampaian Informasi Klarifikasi Kedua dari Pemri, serta Permintaan Informasi dan Klarifikasi Tambahan (ketiga) dari Komisi Eropa terkait Aplikasi Indonesia untuk Mengimpor Limbah dari UE dalam Kerangka EU Waste Shipment Regulation (EUWSR) sesuai Disposisi No. 96 tanggal 19 Januari 2026. 5. Laporan Sosialisasi Kepmmenko 613 Tahun 2025 dan Pembahasan Program Kerja KNFP 2026 sesuai Disposisi No. 92 tanggal 19 Januari 2026. 6. Ucapan Terima kAsih atas Kehadiran pada Grand Opening Vinfast Manufacturing Indonesia sesuai Disposisi No. 90 tanggal 19 Januari 2026. 7. Permohonan Audiensi atas Rencana Revisi PMK 131/2018 tentang Kawasan Berikat sesuai Disposisi No. 83 tanggal 19 Januari 2026. 8. Identifikasi Potensi Peningkatan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi melalui Kegiatan Indonesia Busniess Forum di Hong Kong, 21 November 2025 serta Business Networking Lunch di Makau, 22 November 2025 sesuai Disposisi No. 88 tanggal 19 Januari 2026. 9. Usulan Komoditas Bungkil Kedelai dari NonLartas menjadi Lartas sesuai Disposisi No. 152 tanggal 26 Januari 2026. 10. Permohonan Pertimbangan Kebijakan atas Dampak Tarif CVD Produk Plywood ke USA sesuai Disposisi No. 197 tanggal 3 Februari 2026. 11. Laporan Pelaksanaan Rangkaian Pertemuan ke-4 Senior Economic Officials Meeting (SEOM RI-Australia, Penandatanganan Subsidiary Arrangement Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (PROSPERA) Fase 2, serta Pertemuan Lainnya, tanggal 8-9 Desember 2025 di Canberra, Australia, sesuai Disposisi No. 194 tanggal 3 Februari 2026. 12. Permohonan Arahkan Posisi dan Susunan Delegasi RI untuk Menghadiri Rangkaian Pertemuan Second Substantive Meeting (SSM) Sengketa DS 622 (European Union - Anti Dumping Measures on Imports of Fatty Acid from Indonesia), Jenewa, 3-4 Februari 2026, sesuai Disposisi No. 214
--	--	--	---

		tanggal 3 Februari 2026. 13. Laporan Rangkaian Kegiatan Menko Perekonomian dalam rangka Kunjungan Kerja Presiden RI ke London, Inggris, 19-21 Januari 2026, sesuai Disposisi No. 208 tanggal 3 Februari 2026. 14. Permintaan Pertemuan One on One Meeting Program Baru (Cita Phase - 2) oleh ADB, tanggal 9 Februari 2026, sesuai Disposisi No. 200 tanggal 3 Februari 2026. 15. Penyampaian Rekomendasi terkait Rancangan Peraturan Presiden mengenai Penugasan Khusus PT Pertamina (Persero) untuk Melaksanakan Pembelian Produk Energi dan Investasi di Bidang Energi dalam rangka Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat, sesuai Disposisi No. 268 tanggal 9 Februari 2026. 16. Undangan menghadiri Acara Peluncuran Studi Oxford Economics 2026 "Economic Insights: Unlocking Indonesia's Agri-Food Powerhouse" tanggal 1 April 2026, sesuai Disposisi No. 296 tanggal 11 Februari 2026. 17. Usulan Pengaturan Impor Beras Pecah sesuai Disposisi No. 427 tanggal 6 Maret 2026. 18. Permohonan Klarifikasi Status Taris Produk Ban untuk Ekspor ke Amerika Serikat sesuai Disposisi No. 432 tanggal 6 Maret 2026. 19. Usulan Pengaturan Ekspor Beras sesuai Disposisi No. 426 tanggal 6 Maret 2026. 20. Undangan Rapat pembahasan Keberatan terhadap Rencana Kebijakan BMAD/BMTP atas Produk Plastik Tertentu, tanggal 6 Maret 2026, sesuai Disposisi No. 419 tanggal 5 Maret 2026.
		Tindak lanjut monitoring dan evaluasi isu strategis bidang Pengembangan Logistik Nasional dilakukan dengan: 1. Permintaan Pertemuan One on One Meeting Program Baru (Cita Phase - 2) oleh ADB, tanggal 9 Februari 2026, sesuai Disposisi No. 200 tanggal 3 Februari 2026. 2. Laporan Pelaksanaan Rangkaian Pertemuan ke-4 Senior Economic Officials Meeting (SEOM RI-Australia, Penandatanganan Subsidiary Arrangement Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (PROSPERA) Fase 2, serta Pertemuan Lainnya, tanggal 8-9 Desember 2025 di Canberra, Australia, sesuai Disposisi No. 194 tanggal 3 Februari 2026. 3. Mission Announcement on National Quality Infrastructure March 30-April 2, 2026, sesuai Disposisi No. 469 tanggal 13

			Maret 2026.
			Tindak lanjut monitoring dan evaluasi isu strategis bidang Pengembangan Ekonomi Digital dilakukan dengan: 1. Turut berpartisipasi sebagai peserta Pelatihan Google Career Certificates sesuai Surat Asdep Ekonomi Digital No. KWU.06.02/133/D.III.M.EKON.5/11/2025 tanggal 6 November 2025. 2. Berdasarkan Surat Undangan BAPPEDA PEMPOROV DKI Jakarta No. e-0014/KI.02.00 tanggal 7 Januari 2026, turut berpartisipasi dalam agenda Rapat Kolaborasi Program Hackathon antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kemenko Perekonomian. 3. Menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB sesuai Surat Undangan Asdep Ekonomi Digital No. PED.04.06/18/D.III.M.EKON.5/01/2026 tanggal 21 Januari 2026. 4. Menyusun bahan Keynote Speech dalam agenda "Indonesia-Japan Policy Research Forum for Asia: Navigating the Impact of the Digital Economy on Productivity and Inequality in Asia" yang diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2026, sesuai Surat LPEM FEB Universitas Indonesia No. S-948c/UN2.F6.LPEM/PPM.00/2025 tanggal 24 Desember 2025. 5. Menyusun bahan sambutan Menko Perekonomian pada acara Orasi Sidang Terbuka ITB Penyambutan Mahasiswa Baru "Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Maju: Tiga Mesin Pertumbuhan untuk Masa Depan Bangsa" yang diselenggarakan di ITB pada tanggal 30 Januari 2026. 6. Menyusun bahan sambutan Menko Perekonomian pada acara Indonesia Economic Summit (IES) 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 3 Februari 2026. 7. Menyusun bahan sambutan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital pada Agenda Wisuda Sarjana STTI NIIT "Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Maju: Tiga Mesin Pertumbuhan untuk Masa Depan Bangsa" pada tanggal 5 Februari 2026. 8. Menyusun bahan sambutan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital pada Press Conference ASOCIO Digital AI Summit 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 6 Maret 2026. 9. Menyusun bahan Keynote Speech Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan pada agenda Bank Indonesia "FGD Arah Kebijakan Pemerintah dalam Digitalisasi untuk Mendorong Pertumbuhan

			Ekonomi Nasional dan Daerah” yang diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2026. 10. Menyusun bahan Keynote Speech Menko Perekonomian dalam Agenda World Engineering Day 2026 yang diselenggarakan tanggal 4 Maret 2026. 11. Menyusun bahan Keynote Speech Menko Perekonomian dalam Agenda Grand Launching AI Open Innovation Challenge 2026 yang diselenggarakan tanggal 13 Maret 2026.
			Tindak lanjut monitoring dan evaluasi isu strategis bidang Peningkatan Inklusi Keuangan dilakukan dengan: 1. Turut berpartisipasi dalam agenda Rakornas dan Rakorpusda P2DD 2025 sesuai Disposisi No. 216 tanggal 4 Februari 2026. 2. Turut berpartisipasi dalam agenda Evaluasi Kinerja TP2DD 2025 (Championships 2026) sesuai Disposisi No. 217 tanggal 4 Februari 2026. 3. Turut berpartisipasi dalam undangan sebagai Narasumber pada Talkshow Sharia Economic and Financial Outlook (ShEFO) 2026, tanggal 13 Februari 2026, sesuai Disposisi No. 236 tanggal 5 Februari 2026.

Selain itu, upaya lainnya untuk menunjang IKU ini Sekretariat Deputy III telah berpartisipasi dalam kegiatan:

1. Dalam rangka penyelesaian isu strategis yang diberikan oleh Deputy, Sekretaris Deputy juga diamanahi sebagai penanggungjawab Kelompok Kerja Percepatan Perdagangan Jasa dan Ekonomi Digital sesuai Surat Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Optimalisasi Kinerja Bidang Perdagangan Jasa Sementara dalam Platform Ekonomi Digital (*Gig Economy*) dan Pengembangan *Artificial Intelligence* (AI) di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi dan Ekonomi Digital.
2. Turut berpartisipasi dalam agenda Rapat Kick Off Meeting dan Desk Pendampingan Pelaporan Evaluasi RKP Triwulan IV 2025 sesuai Disposisi No. EP.03.01/7/SET.M.EKON.1/01/2026 tanggal 7 Januari 2026.
3. Turut berpartisipasi dalam agenda Penyampaian Umpan Balik Kementerian PPN/Bappenas atas Pengisian Capaian RKP Triwulan IV 2025 sesuai Disposisi No. EP.03.01/46/SET.M.EKON.1/02/2026 tanggal 6 Februari 2026.
4. Beberapa kegiatan tambahan dalam menunjang IKU ini, kami sampaikan melalui tautan berikut: <https://drive.google.com/drive/folders/1Zl84dYhueOTsfv3LTb7-lwgog1yAVnKq?usp=sharing>.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, seperti menggunakan dokumen digital dan memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dalam melakukan persuratan, rapat koordinasi melalui *video conference*, rapat koordinasi secara hybrid menggunakan fasilitas kantor. Jumlah efisiensi dari pengadaan rapat koordinasi melalui video conference tersebut diperkirakan mencapai Rp72.390.000 melalui penghematan biaya paket meeting di hotel. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain mendukung implementasi

pelaporan di Deputi III pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terbatasnya alokasi anggaran untuk Isu Strategis yang ditetapkan.
2. Terkadang disposisi dari pimpinan bersifat *last minute* dalam waktu yang sempit.
3. Keterbatasan kompetensi SDM dalam mengatasi Isu Strategis yang ditugaskan.

Berdasarkan kendala tersebut, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal, yaitu dengan berkoordinasi secara informal dan mengikuti kegiatan secara daring (zoom).
2. Mitigasi tugas mendadak dengan sosialisasi aplikasi Srikandi di gawai pegawai, sehingga notifikasi disposisi dapat segera disampaikan.
3. Aktif mengikuti Rapat Koordinasi atau *Transfer Knowledge* baik dari unit kerja Asdep maupun Kementerian/Lembaga pengampu.

1.6. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Latar Belakang

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Unit kerja melakukan pembangunan zona integritas yang nantinya akan dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI). Komponen penilaian pembangunan ZI terdiri dari: (Komponen dan kriteria dapat berubah mengikuti peraturan yang berlaku)

1. Nilai Komponen Pengungkit ZI dengan kriteria nilai minimal 42,75
2. Nilai Komponen Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dengan kriteria nilai minimal 3,6
3. Nilai Komponen Hasil Subkomponen Hasil "Kinerja lebih baik" dengan kriteria nilai minimal 2,5
4. Nilai Komponen Hasil Survei Pelayanan Publik yang Prima dengan kriteria nilai minimal 3,2

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pembangunan ZI Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah sebagai berikut:

$$\left(\left(\frac{\text{Realisasi Komponen Penilaian 1}}{\text{Nilai Minimum Komponen Penilaian 1}} \right) + \dots + \left(\frac{\text{Realisasi Komponen Penilaian ke-n}}{\text{Nilai Minimum Komponen Penilaian ke-n}} \right) \right) \times 100\%$$

Jumlah Seluruh Komponen

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Persentase Pembangunan ZI Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026 adalah sebesar 87%. Target tersebut dihitung berdasarkan realisasi komponen penilaian 1 - 4 dibagi dengan nilai minimum komponen penilaian dibagi dengan jumlah seluruh komponen.

Pada Triwulan I 2026, Persentase Pembangunan ZI Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital belum dapat diukur karena masih dalam proses persiapan pelaksanaan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI dari Inspektorat Kemenko Perekonomian, sehingga diproyeksikan realisasi pada Triwulan I tahun 2026 ini mencapai 101,93% (capaian 110%) berdasarkan data realisasi Triwulan IV Tahun 2025. Rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.6. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	87%*	101,93% **	110% (Memuaskan)

*) Target kumulatif Tahun 2026

**) Realisasi Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy III Tahun 2025

Perhitungan capaian realisasi tersebut dilakukan oleh Tim Penilaian Internalan (TPI) Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan rumus perhitungan LKE ZI yang terdiri dari area perubahan:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tatalaksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.6. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital				
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan	
1	Tindak lanjut perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil simulasi LKE ZI Tahun 2025	Terlaksana	Berdasarkan Nota Dinas Inspektorat No. PW.06.02/11/INS.M.EKON/01/2026 tanggal 14 Januari 2026 hal Penyampaian Nilai Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI untuk Mendukung Nilai IKU, Deputy III memperoleh nilai evaluasi sebesar 75,13 (Nilai IKU 101,93%).	
2	Tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi SPIP Tahun 2025	Terlaksana	Tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi SPIP Tahun 2025 telah dilaksanakan melalui Rapat Pembahasan Notisi Hasil Evaluasi SPIP Tahun 2025 tanggal 19 Januari 2025 berdasarkan Surat Undangan Inspektorat No. PW.04.03/01/INS.M.EKON/01/2026 tanggal 13 Januari 2026.	

Walaupun pada Triwulan I Tahun 2026 belum ditetapkan target perhitungan Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, proses penyelesaian rencana aksi telah dilaksanakan melalui:

- tindak lanjut rekomendasi LKE ZI Tahun 2025 sesuai Disposisi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan EKonomi Digital No. 98 tanggal 19 Januari 2026, yang membahas Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM Deputy III Tahun 2025 dalam Rapat Internal seluruh pegawai Deputy III di Loka Kahuripan Lt4 Gedung Ali Wardhana pada tanggal 2 Januari 2026.
- tindak lanjut perbaikan hasil Evaluasi SPIP Tahun 2025 sesuai Disposisi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan EKonomi Digital No. 499 tanggal 26 Maret 2026 dan Rapat Pembahasan Notisi Hasil Evaluasi SPIP Tahun 2025 tanggal 19 Januari

Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP dapat diakses melalui tautan <https://tinyurl.com/KKPMSPID32025> dan bukti dukung dapat diakses melalui tautan <https://tinyurl.com/BuktidukungPMSPID32025>.

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/KKZI2025> beserta dokumen bukti dukung melalui tautan <https://bit.ly/DokZI2025>.

Pelaksanaan rencana aksi dalam rangka perhitungan Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, seperti menggunakan dokumen digital dan memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dalam melakukan persuratan, rapat koordinasi melalui *video conference*, rapat koordinasi secara hybrid menggunakan fasilitas kantor, serta penyebaran survey melalui formulir elektronik. Jumlah efisiensi dari pengadaan rapat koordinasi melalui video conference tersebut diperkirakan mencapai Rp20.550.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain mendukung implementasi pembangunan ZI di Deputy III pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Pelaksanaan Pembangunan ZI pada Triwulan I Tahun 2026 masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah belum dimulainya proses penilaian resmi melalui pengisian LKE ZI oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga pengukuran capaian indikator belum dapat dilakukan secara aktual dan masih menggunakan proyeksi berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025. Kondisi tersebut menyebabkan ruang untuk mengukur efektivitas implementasi perbaikan secara riil pada Triwulan I masih terbatas.
2. Di sisi lain, tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi LKE ZI dan evaluasi SPIP memerlukan penguatan koordinasi lintas unit kerja agar seluruh bukti dukung, penyempurnaan proses bisnis, serta implementasi perbaikan pada enam area perubahan dapat dilakukan secara konsisten dan terdokumentasi sesuai kriteria penilaian. Dinamika perubahan kebijakan dan penyempurnaan instrumen evaluasi ZI juga menuntut unit kerja untuk terus melakukan penyesuaian terhadap dokumen, mekanisme kerja, dan pemenuhan eviden agar tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kendala tersebut, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi sebagai berikut:

1. Sebagai langkah perbaikan, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital terus memperkuat tata kelola pembangunan ZI melalui percepatan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi LKE ZI dan SPIP Tahun 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui pembahasan secara berkala bersama seluruh unit kerja untuk memastikan setiap rekomendasi diterjemahkan ke dalam rencana aksi yang terukur, memiliki penanggung jawab yang jelas, serta dipantau progres penyelesaiannya.
2. Selain itu, dilakukan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi internal terhadap pemenuhan enam area perubahan ZI, termasuk penyempurnaan kualitas bukti dukung, standarisasi dokumentasi, dan pemanfaatan sistem digital sebagai repositori dokumen evaluasi sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Unit kerja juga akan meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat selaku Tim Penilai Internal guna memperoleh pendampingan terhadap perubahan kebijakan maupun penyempurnaan instrumen penilaian, sehingga seluruh persyaratan evaluasi dapat dipenuhi secara optimal dan target pembangunan Zona

Integritas Tahun 2026 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

**1.7. Indeks
Kepuasan Layanan
Sekretaris Deputy
Bidang Koordinasi
Perniagaan dan
Ekonomi Digital**

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 90, Sekretaris Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata Kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Layanan Sekretaris Deputy adalah layanan yang diberikan oleh Sekretaris Deputy kepada Kedeputan untuk melaksanakan tugas koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan dalam :

- A. Perencanaan, program dan anggaran;
- B. Pengelolaan kinerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- C. Pengelolaan sistem pengendalian internal;
- D. Pengelolaan data dan sistem informasi;
- E. Pengelolaan penataan organisasi, tata laksana, dan SDM;
- F. Pengelolaan BMN;
- G. Penataan kearsipan dan persuratan;
- H. Pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan naskah pimpinan, dan administrasi;
- I. Pemantauan, analisis dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- J. Pemantauan, evaluasi, dan laporan program kegiatan dan tata kelola; dan
- K. Pelaksanaan fungsi lainnya.

Indikator kepuasan layanan Sekretaris Deputy mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Sesdep kepada Kedeputan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Deputy. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu :

1. **Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*)**
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan
2. **Aspek Keandalan dalam layanan (*Reability*)**
Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan
3. **Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*)**
Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan
4. **Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*)**
Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman
5. **Aspek Sikap dalam Layanan (*Emphaty*)**
Menunjukkan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan

Seluruh aspek kepuasan ini dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

1. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50
2. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
3. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
4. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4.00

Indikator Kinerja Utama Indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputy diukur

melalui Survei Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Daftar pertanyaan survei terdiri dari beberapa pertanyaan berupa 5 (lima) jenis aspek layanan yang telah diberikan oleh Sesdep kepada Deputy. Jumlah responden dipilih secara acak/random dan berasal dari unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

$$\text{Rumus Perhitungan : } \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing – masing item survei}}{\text{Jumlah Item Survei}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy adalah 3 dari 4 (Baik) pada Tahun 2026. Target tersebut dapat terealisasi apabila survei yang dilakukan kepada seluruh pejabat dan pegawai di Kedeputan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital baik ASN baik PNS maupun PPPK di Unit Kerja Asisten Deputy Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Asisten Deputy Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor, Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional, Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital, dan Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan memberikan penilaian hasil yang memuaskan. Penetapan target kinerja tersebut didasarkan pada hasil dialog kinerja dan arahan dari Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Adapun Indeks Triwulan I 2026 capaian sebesar 3,33 atau mencapai 111% dari target Semester 1 Tahun 2026 sebesar 3 (dari 4). Ringkasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I 2026	Realisasi*	% Kinerja*
IKU 1.7. Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4*	3,24**	110%

*) Target kumulatif Tahun 2026

**) Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester II Tahun 2025

Dikarenakan penilaian dan perhitungan Survei Kepuasan Layanan pada Semester 1 Tahun 2026 yang ditargetkan pada rentang Indeks 3 dari 4 akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026, nilai capaian yang disajikan masih menggunakan nilai Semester 2 Tahun 2025 sebesar 3,24 (Puas).

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai target Semester 1 Tahun 2026, beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks Kepuasan Layanan semester sebelumnya menjadi pertimbangan. Pada Semester 2 Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris diperoleh nilai rata-rata Indeks 3,24 (Puas) dengan responden Survei Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy III berjumlah 32 orang yang tersebar di semua Keasdepan lingkup Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.7. Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Penyusunan kuesioner pengukuran survei kepuasan layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Terlaksana	Mempersiapkan daftar kuesioner pengukuran survey kepuasan layanan Semester 1 Tahun 2026.
2	Pelaksanaan survei kepuasan layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital triwulan I	Terlaksana	Pengisian survei pada tautan bit.ly/SurveiKepuasanSem2_Sesdep3

Rencana aksi sepanjang TW I Tahun 2026 terkait Indeks Kepuasan Layanan telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dan efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan. Media yang digunakan yaitu melalui *google formulir* dan koordinasi secara daring antara Tim Sekretariat Deputy bersama responden Keasdepan. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan yang akan dilakukan pada kegiatan yang akan datang.

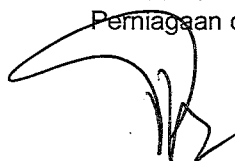
Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, seperti menggunakan dokumen digital dan memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dalam melakukan persuratan dan penyebaran survey melalui formulir elektronik. Jumlah efisiensi dari pengadaan rapat koordinasi melalui video conference tersebut diperkirakan mencapai Rp20.550.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain mendukung implementasi kepuasan layanan di Deputy III pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Belum terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penyusunan Survei Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy pada Triwulan I Tahun 2026.

Jakarta, 10 April 2026

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital



Pujo Setio